BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 139 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN
HUTAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) butir a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola bidang kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan hutan meliputi Penunjukan, Penataan Batas, Pemetaan dan Penetapan Kawasan Hutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170 Tahun 2000 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
15. Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 1999 tentang Arahana Fungsi Hutan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- K E S A T U** : Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Panitia Tata Batas Kawasan Hutan" dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- K E D U A** : Panitia Tata Batas Kawasan Hutan mempunyai tugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan terhadap persiapan dan pelaksanaan tata batas kawasan hutan;
 - b. mensosialisasikan rencana tata batas kawasan hutan;
 - c. meneliti dan memeriksa hasil pelaksanaan tata batas;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan.
 - e. Mempublikasikan Tata Batas Kawasan Hutan.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- K E E M P A T** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBN maupun sumber anggaran lainnya.
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Juni 2010**

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
 Nomor : 138 TAHUN 2010
 Tanggal : 16 JUNI 2010

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN
 KABUPATEN BIREUEN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Ketua	
2	Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bireuen	Sekretaris /Anggota	
3	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Keistimewaan Aceh	Anggota	
4	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	
5	Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan & Perkebunan Aceh	Anggota	
6	Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bireuen	Anggota	
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen	Anggota	
8	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bireuen	Anggota	
9	Camat Terkait	Anggota	
10	Mukim Terkait	Anggota	
11	Geuchiek Gampong Terkait	Anggota	

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN